

**ANALISIS PENGARUH VARIABEL STRUKTUR  
EKONOMI, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN  
KERJA, KREDIT INVESTASI, DANA ALOKASI UMUM  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN  
PEMBANGUNAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Feiruz Niswah  
115020107111048**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

### **ANALISIS PENGARUH VARIABEL STRUKTUR EKONOMI, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, KREDIT INVESTASI, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA**

Yang disusun oleh :

Nama : Feiruz Niswah  
NIM : 115020107111048  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 04 September 2017.

Malang, 04 September 2017

Dosen Pembimbing,



**Dr. Sasongko. SE., MS.**

NIP 19530406 198003 1 004

# **ANALISIS PENGARUH VARIABEL STRUKTUR EKONOMI, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, KREDIT INVESTASI, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA**

**Feiruz Niswah**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*

Email: feiruzniswah@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Ketimpangan pembangunan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidemansional dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor struktur ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, kredit investasi, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah panel data menggunakan data sekunder, data dengan pendekatan efek tetap (Fixed Effect Method) dan dummy wilayah. Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini adalah untuk melihat variasi tingkat ketimpangan pembangunan antar 33 provinsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada alpha 5 persen variabel pdrb sektor industri dan jasa, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan kredit investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Sedangkan variabel pdrb sektor pertanian, dana alokasi umum dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia.*

*Kata kunci: Ketimpangan pembangunan antar provinsi, struktur ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, kredit investasi, dana alokasi umum, belanja modal.*

---

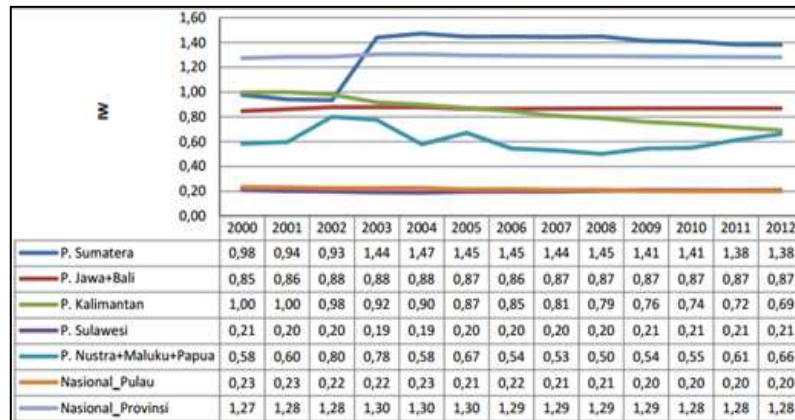
## **A. PENDAHULUAN**

Pengertian pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dapat menyebabkan pendapatan perkapita meningkat dalam jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Sukirno, 1985:13). Pembangunan ekonomi yang secara terus menerus disebut gross domestic product atau Produk Domestik Bruto untuk suatu negara. Sedangkan untuk provinsi, kabupaten, dan kota pembangunan ekonomi difokuskan kepada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (Kuncoro, 2004:62). Dengan demikian untuk dapat mencapai pemerataan pembangunan bisa dilihat dari besarnya PDRB suatu daerah. Menurut Sadono (2000), alat untuk dapat melihat dan mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah itu sendiri.

Terjadinya kesenjangan atau ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah atau daerah merupakan sebuah konsekuensi dari pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan masalah yang sering dihadapi negara-negara berkembang di dunia. Pengukuran disparitas atau ketimpangan pembangunan dapat ditunjukkan dengan menggunakan Indeks Williamson.

Menurut Neo Klasik ketimpangan terjadi karena adanya perbedaan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi. Akibat dari adanya perbedaan tersebut, kemampuan suatu daerah dalam mendorong pembangunan juga menjadi berbeda. Sehingga muncul daerah yang maju dan daerah yang terbelakang.

Gambar 1 : Hasil Analisis Indeks Williamson untuk PDRB perkapita di Indonesia tahun 2000-2012



Sumber : BPS Indonesia 2013, diolah

Pada Gambar 1 hasil analisis terlihat ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson untuk ketimpangan pembangunan sangat tinggi atau pembangunan antar provinsi tidak merata dengan ketimpangan indeks williamson dari tahun 2000-2012 rata-rata > 1. Sementara ketimpangan pembangunan antar provins menurut masing-masing pulau menunjukkan bahwa pulau Sumatera, Jawa+Bali, Kalimantan, dan Nusta-Maluku-Papua mengalami pembangunan tidak merata (ketimpangan tinggi), sebaliknya di Sulawesi mengalami pembangunan yang merata (ketimpangan rendah).

Lebih lanjut dalam publikasi BAPPENAS (2013) menyebutkan bahwa kesenjangan atau ketimpangan yang terjadi di suatu daerah menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan migrasi dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju, pengangguran, kriminalitas, dan konflik antar masyarakat.

## B. KAJIAN TEORI

### Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Pertumbuhan Neo-Klasik merupakan analisa yang didasarkan kepada teori klasik. Dalam analisa Neo-Klasik, yang dikemukakan oleh Robert Solow (1957) didasarkan pada pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Solow Swan membagi proses pertumbuhan ekonomi dengan faktor-faktor produksi yang berpengaruh adalah pengaruh tenaga Kerja yang bekerja, pengaruh teknologi dan pengaruh modal.

#### a. Model Pertumbuhan Tanpa Perkembangan Teknologi

$$Y_t = f(K_t, L_t)$$

Dengan Y adalah pendapatan riil, K adalah stok modal, L adalah tenaga kerja dan t adalah subskrip untuk waktu.

#### b. Model Pertumbuhan Dengan Perkembangan Teknologi

$$Y_t = f(A_t, K_t, L_t)$$

Dengan A adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat dikatakan tidak melekat dalam model karena tidak tergantung dari masukan modal dan tenaga kerja.

### Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah modal. Pada awalnya, teori pertumbuhan endogen mulai berkembang dalam dua cabang pemikiran. Pertama, mereka percaya bahwa learning-by-doing dengan introduksi hal-hal baru (yang bersifat eksternal) dalam perekonomian merupakan pendorong bagi peningkatan produktivitas perekonomian. Kedua, mereka yang percaya bahwa penemuan-penemuan baru adalah sumber utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi. Kedua aliran itu sepakat bahwa SDM merupakan kunci utama dari peningkatan produktivitas ekonomi.

### **Teori Pembangunan Struktural Ekonomi**

Teori pembangunan struktural ekonomi ini ditemukan oleh W.Arthur Lewis dengan teori proses pembangunan yang terjadi di antara daerah kota dengan desa, yang dimana terjadinya pola urbanisasi dan migrasi diantara kedua tempat tersebut, sehingga terjadi perpindahan (mobilitas). Sedangkan teori pola pembangunan yang dikemukakan oleh Holis B. Chenery mengenai perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri ke struktur institusi dalam proses pembangunan perekonomian suatu negara yang sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari sektor pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai bagian utama dari pertumbuhan ekonomi (Sun'an, 2015:73).

### **Teori Keynes**

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah:  $Y = C + I + G + NX$  Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi, (I) Investasi, (G) adalah Pengeluaran pemerintah dan (NX) adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian dan Metode Pengumpulan Data**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan jenis data sekunder untuk 33 Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2005 – 2014. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Variabel yang digunakan yaitu Struktur Ekonomi (PDRB Pertanian, PDRB Industri dan PDRB Jasa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Kredit Investasi, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal sebagai variabel independen, serta variabel Ketimpangan Pembangunan (Indeks Williamson) antar provinsi sebagai variabel dependen.

### **Model Analisis**

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh PDRB Sektor Pertanian, Industri dan Jasa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Kredit Investasi, DAU (Dana Alokasi Umum), dan Bleanja Modal terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia tahun 2005-2014. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 2005 sampai 2014 dan data cross section sebanyak 33 provinsi di Indonesia. Fungsi persamaan kemudian dimasukkan kedalam model regresi panel dirumuskan menjadi model berikut :

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \ln\beta_1 X1 + \ln\beta_2 X2 + \ln\beta_3 X3 + \ln\beta_4 X4 + \ln\beta_5 X5 + \ln\beta_6 X6 + \ln\beta_7 X7 + \epsilon_{it}$$

Dimana :

Y = Indeks Williamson

i = Provinsi

t = Waktu (2005-2014)

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_7$  = Koefisien

X1 = PDRB Sektor Pertanian

X2 = PDRB Sektor Industri

X3 = PDRB Sektor Jasa

X4 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

X5 = Kredit Investasi

X6 = Dana Alokasi Umum

X7 = Belanja Modal

$\epsilon_{it}$  = Error Term

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Multikolinearitas**

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan cara menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen yang dapat di lihat melalui Variance inflation Factor

(VIF). Nilai VIF yang bisa ditoleransi adalah 10. Apabila VIF variabel independen < 10 berarti tidak ada multikolinearitas.

Tabel 1 : Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	VIF	Keterangan
PDRB Pertanian(X1)	5.613	Non Multikolinearitas
PDRB Industri (X2)	4.292	Non Multikolinearitas
PDRB Jasa (X3)	9.711	Non Multikolinearitas
Tenaga Kerja (X4)	1.063	Non Multikolinearitas
Kredit Investasi (X5)	8.076	Non Multikolinearitas
DAU (X6)	1.339	Non Multikolinearitas
Belanja Modal (X7)	2.155	Non Multikolinearitas

Sumber :Eviews 6, data diolah

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi heteroskedastisitas dilakukan dengan metode pengujian uji statistik Breusch Pagan Godfrey, Harvey dan Glejser. Apabila nilai sig. > 0,05 maka akan terjadi homoskedastisitas dan jika nilai sig. < 0,05 maka akan terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 2 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Statistik	Obs R-square	Sig.	Keterangan
Breusch-Pagan Godfrey	7,41	0,387	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Harvey	10,045	0,186	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Glesjer	7,25	0,403	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

**Penentuan Model Estimasi**

a. Uji Chow

Tabel 3 : Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: PROVINSI			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	117.018234	(32,290)	0.0000
Cross-section Chi-square	868.816552	32	0.0000

Sumber : Eviews 6, data diolah

Hasil uji chow menunjukkan nilai probabilitas cross-section F sebesar 0.0000 atau di bawah alpha 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah FEM (Fixed Effect Method).

b. Uji Hausman

Tabel 4 : Hasil Uji Husman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: PROVINSI			
Test cross-section fixed effects			
Test Summary	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section random	15.157297	7	0.0340

Sumber : Eviews 6, data diolah

Uji Hausman memperlihatkan bahwa nilai probabilitas Cross-Section Random sebesar 0.0340 dengan tingkat signifikan lebih dari  $\alpha = 5\%$ , maka menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$  ( $H_0 = REM$ ,  $H_a = FEM$ ).

Sehingga model panel data yang tepat untuk estimasi data panel yang digunakan adalah Fixed Effect Method dari pada Random Effect Method.

### Hasil Regresi Panel

Tabel 5 : Hasil Regresi Data Panel dengan Fixed Effect Method (FEM)

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keputusan
PDRB Pertanian (X1)	0.008029	0.1405	Tidak Signifikan
PDRB Industri (X2)	0.010008	0.0000	Signifikan
PDRB Jasa(X3)	-0.039334	0.0000	Signifikan
TPAK (X4)	0.281253	0.0355	Signifikan
Kredit Investasi (X5)	0.001490	0.0003	Signifikan
DAU (X6)	-0.009829	0.2606	Tidak Signifikan
Belanja Modal (X7)	0.007057	0.0558	Tidak Signifikan
R-squared	0.934509		
Prob (F-statistic)	0.000000		

a. Uji F

Dari hasil uji signifikansi simultan (Uji F) diperoleh nilai probabilitas  $F_{stat}$  sebesar 0.000000 dimana hasil tersebut adalah lebih kecil dari *significant level* (tingkat kesalahan)  $\alpha = 5\%$ . Hasil uji ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dimana semua variabel bebasnya (independent variable) secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikatnya (dependent variable).

b. Uji  $R^2$

Selain itu, juga didapat nilai  $R_{squared}$  sebesar 0.934509. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel bebasnya (independent variable) mampu menjelaskan variabel terikatnya (dependent variable) sebesar 99% dan sisanya 1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

c. Uji t

Hasil uji t menjelaskan bahwa tiga variabel bebas (independent variabel) yaitu struktur ekonomi (PDRB Sektor Industri dan Jasa), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Kredit Investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Sedangkan tiga variabel lain yaitu PDRB Sektor Pertanian, Dana alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi di Indonesia.

### Implikasi Penelitian Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

a. Pengaruh Struktur Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Indonesia

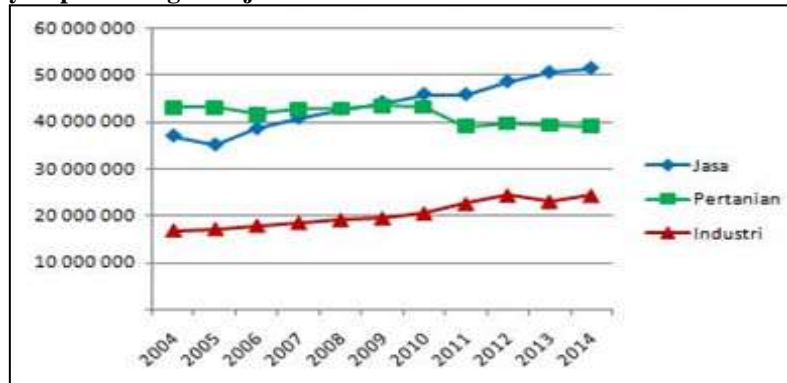
Struktur ekonomi PDRB Sektor Pertanian memiliki nilai koefisien positif (0.008029) dan tidak berpengaruh signifikan. Sehingga, dapat diartikan bahwa jika PDRB Sektor pertanian mengalami kenaikan maka indeks williamson diduga akan menurun. Sektor pertanian ini merupakan sektor yang tertinggal dari 2 sektor lainnya. Ini sesuai dengan teori pembangunan struktural dimana pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, dan sangat didominasi oleh sektor industri dan jasa. Variabel PDRB Sektor Pertanian tidak berpengaruh signifikan karena secara tidak langsung Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sehingga secara tidak langsung ketimpangan pembangunan antar provinsi bisa menurun, dan secara langsung berarti bahwa sektor pdrb pertanian tidak mempengaruhi ketimpangan pembangunan atau sebagai variabel yang tidak dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan.

Struktur ekonomi PDRB Sektor Industri memiliki nilai koefisien yang positif (0.010008) dan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. PDRB Sektor Industri dapat meningkatkan ketimpangan akibat terjadinya pola migrasi dan urbanisasi antara kedua tempat sehingga terjadi mobilitas tenaga kerja dari desa ke kota. Seperti yang diungkapkan teori Artur Lewis bahwa perekonomian industri pengalihan tenaga kerja dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor modern.

Struktur ekonomi PDRB Sektor jasa mempunyai nilai koefisien negatif (-0.039334) dan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Sektor jasa

merupakan proses dari sebagai sektor yang dianggap paling tinggi dalam teori Pola Pembangunan Chenry. Dimana suatu daerah yang maju dan makmur merupakan daerah yang memiliki struktur ekonomi yang berbasis pada sektor jasa. Namun sektor jasa tetap harus mengintegrasikan dengan sektor lainnya. Sehingga terjadi saling menguntungkan pada setiap sektor.

Gambar 2 : Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Tahun 2004 2014



Sumber : BPS, 2014

Gambar diatas menjelaskan bahwa persebaran dari tenaga kerja di setiap sektor. Pada tahun 2008 sektor pertanian lah yang menjadi unggul dalam kegiatan perekonomian nasional, terdapat 40 juta tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini. Namun pada tahun 2009 keatas sektor jasa yang mulai menunjukkan peningkatan tren dan melewati jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, sedangkan sektor pertanian mengalami penurunan dan mulai bergerak kebawah. Adanya peralihan tenaga kerja pada sektor pertanian ke sektor industri dan jasa akibat adanya faktor upah dan urbanisasi. Akan tetapi fenomena adanya perubahan struktur ekonomi ini menunjukkan hal dimana sektor industri justru hanya menyerap sedikit tenaga kerja dan cenderung konstan.

b. Pengaruh TPAK Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Indonesia

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki hubungan yang positif terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Dalam teori Neoklasik, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan suatu wilayah, dengan kata lain peningkatan dalam jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari wilayah tersebut, dan aliran neoklasik percaya bahwa adanya mobilitas faktor yang sempurna. Namun dalam jangka panjang faktor modal bergerak sebaliknya, yaitu dari daerah yang maju ke daerah yang tertinggal. Karena daerah yang tertinggal mempunyai nilai upah yang kecil sehingga para investor lebih memilih daerah tertinggal dalam hal tingkat upah. Pada penelitian untuk studi kasus provinsi di Indonesia ini dihasilkan bahwa pengaruh tenaga kerja signifikan terhadap ketimpangan suatu kesimpulan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja akan meningkatkan ketimpangan pembangunan yang terjadi. Meskipun daerah maju memiliki nilai upah yang tinggi, namun jumlah lapangan pekerjaan tetap memiliki jumlah yang terbatas, dengan kata lain bahwa jumlah lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja, sehingga menyebabkan kurang terserapnya tenaga kerja.

c. Pengaruh Kredit Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Indonesia

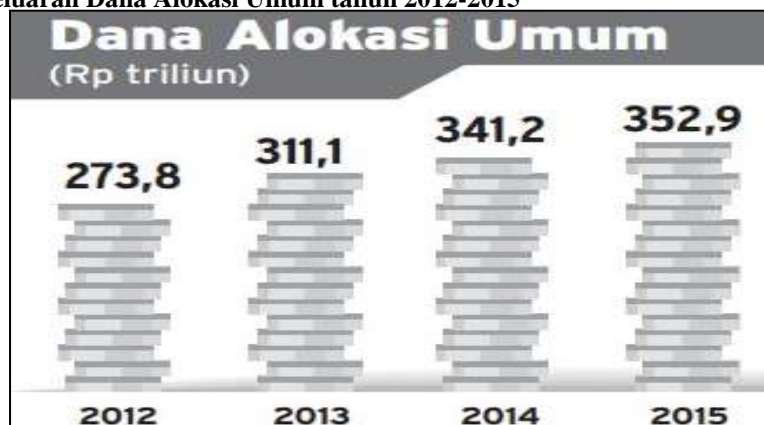
Kredit Investasi memiliki hubungan positif dengan koefisien 0.001490 dan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Artinya jika jumlah kredit investasi naik sebesar 1%, maka akan meningkatkan ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia sebesar 0.001490%. Berdasarkan teori aliran neoklasik mengatakan bahwa modal memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi atau dengan hasil output suatu wilayah. Kegiatan investasi membuat masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonominya dan membantu menciptakan lapangan kerja dan menaikkan produktivitas sektor-sektor. Selain itu menurut neoklasik, modal akan mengalir dari daerah yang maju menuju ke daerah yang tertinggal atau dengan kata lain memiliki mobilitas sempurna. Namun pada penelitian ini variabel kredit investasi memiliki hasil yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya aliran dana investasi diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar provinsi di Indonesia secara langsung namun perlu adanya pemerataan dalam penyaluran dana kredit pada daerah dan sektor yang tepat.

d. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Indonesia



Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Hubungannya negatif dengan koefisien sebesar -0.009829. Dari hasil penelitian ini Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan walau dengan adanya dana alokasi umum (DAU) dapat membantu mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dengan bantuan tersebut. Menurut Muliana (2009) dana alokasi umum secara tidak langsung membuat meningkatkan kemalasan dan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan pemerintah pusat, DAU seharusnya hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga sebaiknya pemerintah daerah terus mengembangkan potensi daerah dan berupaya agar pendapatan daerah dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah sehingga menjadi daerah potensial.

Gambar 3 : **Pengeluaran Dana Alokasi Umum tahun 2012-2015**



Sumber : APBN 2016

Pada gambar 3 diatas terlihat dana alokasi umum (DAU) setiap tahunnya meningkat mulai tahun 2012 hingga tahun 2015. Hal tersebut berarti setiap daerah masih mengharapkan adanya dana bantuan untuk menutupi kekurangan pada setiap kebutuhan daerah tersebut agar daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak terlalu timpang. Efektivitas penggunaan anggaran dana alokasi umum di suatu daerah juga menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang dalam pembangunan suatu daerah.

a. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Indonesia

Belanja Modal memiliki hubungan yang positif terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Pengaruhnya positif dengan nilai koefisien sebesar 0.007057. Menurut kebijakan fiskal, peningkatan pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja modal untuk meningkatkan pembangunan Karena struktur dari belanja modal, pengeluaran terbesarnya diperuntukan untuk infrastruktur dan fasilitas publik, maka dengan anggaran modal lebih banyak, utamanya untuk infrastruktur jalan, dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. pemerintah pusat maupun daerah dapat bekerjasama untuk lebih mengefisienkan realisasi dari anggaran belanja modal itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam belanja modal, khususnya dalam pendanaan, pengembangan serta pembangunan sarana Infrastruktur sebagai salah satu pos belanja yang memiliki porsi anggaran lebih besar dibandingkan dengan jenis belanja modal lain seperti tanah, peralatan, gedung pemerintahan, dll.

Pada gambar 4.13 diatas terlihat bahwa pengeluaran untuk belanja pegawai lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal. Belanja modal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. Karena pengeluaran dalam belanja modal lebih kecil dibandingkan pengeluaran belanja pegawai lebih besar karena dengan mengingat bahwa disetiap daerah mengalami peningkatan jumlah pegawai dan juga gaji yang diberikan, hal inilah yang menyebabkan belanja pegawai lebih besar dari belanja modal. Daerah yang memiliki pendapatan daerah yang besar akan besar pula pengeluaran untuk belanja modalnya. Namun pemerintah sebaiknya meningkatkan belanja modal karena berkaitan dengan infrastruktur atau fasilitas publik. Dengan adanya fasilitas tersebut daerah yang kurang dalam sumberdaya alam akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Gambar 4 : Belanja APBD Indonesia tahun 2014



Sumber : Kemenkeu, 2015

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Dari hasil estimasi pengujian menggunakan analisis regresi data panel dalam penelitian ini, PDRB Sektor Pertanian, Sektor Industri dan Sektor Jasa, TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), Kredit Investasi, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terdapat pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan. Dimana (1) PDRB Sektor Pertanian berhubungan positif dengan ketimpangan pembangunan, (2) PDRB Sektor Industri berhubungan positif dengan ketimpangan pembangunan, (3) PDRB Sektor Jasa berhubungan negatif dengan ketimpangan pembangunan, (4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja positif terhadap ketimpangan pembangunan, (5) Kredit Investasi berhubungan positif, (6) Dana Alokasi Umum berhubungan negatif dengan ketimpangan pembangunan, dan (7) Belanja Modal berhubungan positif dengan ketimpangan pembangunan.
2. Struktur ekonomi dibagi dalam 3 sektor yakni pertanian, Industri dan Jasa. Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ketiga sektor tersebut harus saling diintegrasikan untuk dapat mengurangi ketimpangan pembangunan. Di Indonesia dari ketiga sektor tersebut hanya sektor Jasa yang memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pembangunan hal ini karena adanya pergeseran struktur ekonomi sehingga sektor jasa yang mulai dapat banyak menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi ketimpangan.
3. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh dalam mengurangi ketimpangan pembangunan dan berslope negatif adalah variabel PDRB Sektor Jasa dan variabel Dana Alokasi Umum. Hal ini mengindikasikan bahwa selama

### Saran

1. Selain itu pemerintah di setiap wilayah provinsi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan para investor lewat pengembangan potensi wilayah terutama dari segi sektor-sektor unggulan di provinsi tersebut agar dengan demikian dapat lebih meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi pada seluruh sektor di masing-masing Provinsi Indonesia.
2. Peranan Investasi Asing sesuai dengan semangat otonomi daerah, hal tersebut juga harus dipacu dengan peningkatan situasi kondusif berinvestasi, pembuatan peta potensi wilayah di setiap provinsi Indonesia dan pembentukan unit pelayanan terpadu di daerah-daerah untuk mempermudah pelayanan pembuatan ijin usaha dan investasi.
3. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantita infrastruktur dengan cara menaikan anggaran belanja modal. Dalam mengumpulkan dana tersebut tidak hanya dana dari pemerintah saja, namun juga bisa menggunakan dana investasi swasta dengan cara mempermudah dan mempromosikan investor untuk mau berinvestasi pada bidang infrastruktur.
4. Perlunya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah, meningkatkan integrasi dan interkoneksi seluruh wilayah sehingga terjadi pemerataan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi ; Pertumbuhan ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah, cetakan pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Amstrong, H.W. and Taylor, J. 2000. Refional Economics and Policy, 3rd edition, Blackwell, Oxford.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (bpkp). Data Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Web: <http://www.bpkp.go.id>, diakses 20 september 2016.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Sektor Pertanian). Web: <https://www.bps.go.id>, diakses pada 12 Juni 2017.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Sektor Industri). Web: <https://www.bps.go.id>, diakses pada 12 Juni 2017.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Sektor Jasa). Web: <https://www.bps.go.id>, diakses pada 12 Juni 2017.
- Badan Pusat Statistik (BPS).Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi 2005-2014. Web: <https://www.bps.go.id>, diakses pada 8 Maret 2016.
- Badan Pusat Statistik (BPS).Perkembangan PDB Indonesia ADHK tahun 2005-2013. Web: <https://www.bps.go.id>, diakses pada 8 Maret 2016.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. Katalog Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. Katalog Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035.
- BAPPENAS. 2013. Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2013. Jakarta.
- BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). 2014. Realisasi Penanaman Modal Di Indonesia 2014. Jakarta.
- Boediono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta : BPF.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Magister Sains Ilmu-ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. Simposium Naional Akutansi. Universitas Hasanudin Makasar.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Data Anggaran Belanja Modal per Provinsi Indonesia. Diakses 12 Maret 2016.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta : LP3ES.
- Dumairy, 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Donmoyer, R. 2008. Generalizability. In Givens, L. (Ed.), Encyclopedia of Qualitative Research.Thousand Oaks,CA: Sage.
- Umiyati, Etik. 2013. Analisia Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Pulau Sumatera. Journal of Paradigma Ekonomika Vol 1, No7 April 2013.
- Gujarati, D.N. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika (Basic Econometrics), Edisi Kelima . Penerbit : Jakarta, Salemba Empat
- Gujarati, D.N. 2003. Basic Econometrics. McGraw-Hill International Edition, Economic Series.
- Hartono, Budiantoro. 2008. Tesis Analisi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Tesis Dipublikasikan. Diakses Tanggal 20 Juni 2016.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian PPN/BAPPENAS. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014. Jakarta.
- Khusaini, M., 2006, Kajian Desentralisasi Fiskal, Pengaruhnya terhadap Efisiensi Ekonomi Sektor Publik, Pertumbuhan Ekonomi Sektor Publik, Pertumbuhan Ekonomi Kekhususan Studi Pembangunan, Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya Malang.
- Krisyanti, Linda. 2007 Analisis Sektor Basis Perekonomian dan Perannya dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnsl Ilmu Ekonomi. Bogor : IPB
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan Teori. Masalah. dan Kebijakan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta : Erlangga.
- Manik, Fitri R. 2009. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kota Medan dengan Kabupaten Simalungun. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mankiw, N. Gregory. 2004. Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. Makroekonomi, Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Mapongga, Herwin. 2011. Analisis Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Volume 10, No1 Juni 2011, Hal 40-51.
- Mubyarto. 2001. Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi. Yogyakarta : BPF
- Muliana. 2009. *Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Rosmeli. 2014. Dampak Belanja Daerah Terhadap Ketimpangan Antar Daerah Di Provinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika. Volume 9. No 01 April 2014.
- Sadono, Sukirno. 2006. Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan, Edisi Kedua. Jakarta : Kencana.
- Sjafrizal, 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Baduose Media, Cetakan Pertama. Padang.
- Sun'an, Muammil. 2015. Ekonomi Pembangunan Daerah. Penerbit : Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Syaiful. 2006. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. Artikel.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Terjemahan, Edisi Kesembilan, Jilid 1 dan 2. Penerbit : Jakarta, Erlangga.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. Pembangunan Ekonomi. Terjemahan, Edisi Kesebelas, Jilid 1 dan 2. Penerbit : Jakarta, Erlangga.
- Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta. Kementerian Keuangan Indonesia.